

RINGKASAN

Kiki Nurpita Sari Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Antara Pendatang
210510040 Asing Ilegal Rohingya Dengan Warga Negara Indonesia
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
 Perkawinan
 (Jumadiah, S.H., M.H, dan Dr. Arnita, S.H., M.H.)

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan semacam ini tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Fenomena tersebut masih kerap terjadi, salah satunya di Kota Medan, yang melibatkan warga negara Indonesia dengan pengungsi asing ilegal etnis Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan secara sah. Masalah yang dibahas pada penelitian ini, yaitu kedudukan hukum serta akibat hukum yang dapat ditimbulkan terhadap perkawinan antara warga negara Indonesia dengan pendatang asing ilegal rohingya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu menggunakan studi dokumen (studi kepustakaan), dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah, yang berkaitan dengan skripsi ini.

Hasil penelitian yang didapatkan yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa setiap perkawinan, termasuk yang bersifat campuran antara WNI dan warga negara asing, harus memenuhi syarat formil dan materiil agar sah menurut hukum. Dalam konteks perkawinan dengan pendatang asing ilegal, syarat-syarat tersebut umumnya tidak terpenuhi, sehingga menyebabkan hubungan tersebut tidak diakui secara yuridis dan berada di luar perlindungan hukum nasional. Perkawinan antara WNI dan pendatang asing ilegal, seperti pengungsi Rohingya, menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. WNI menghadapi kendala administratif dan pembatasan hak, sementara pasangan asing terancam deportasi dan kehilangan status hukum. Anak dari perkawinan ini berisiko dianggap luar kawin, menghadapi kesulitan memperoleh kewarganegaraan dan pencatatan sipil, serta terbatas perlindungan hukumnya. Kondisi ini menuntut respons hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan bagi semua pihak.

Disarankan kepada pemerintah untuk mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif dan adaptif terhadap fenomena perkawinan campuran tersebut, agar dapat menjamin efektivitas perlindungan hukum tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan negara dan tertib administrasi keimigrasian.

Kata Kunci : Perkawinan, Pendatang Asing, Ilegal, Rohingya, Peraturan.

SUMMARY

Kiki Nurpita Sari *Legal Analysis Of Marriages Between Illegal Rohingya
210510040 Foreigners And Indonesian Citizens Based On Law
 Number 1 Of 1974 Concerning Marriage
 (Jumadiah, S.H., M.H, dan Dr. Arnita, S.H., M.H.)*

Mixed marriage is a marriage between two people who in Indonesia are subject to different laws, due to differences in citizenship and one party is an Indonesian citizen. This type of marriage is not permitted if it is contrary to the provisions of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This phenomenon still often occurs, one of which is in the city of Medan, which involves Indonesian citizens with illegal Rohingya ethnic foreign refugees who do not have legal citizenship. The problem discussed in this study is how the legal status and legal consequences can arise from marriages between Indonesian citizens and illegal Rohingya foreign immigrants based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

Based on the formulation of the problem, the research method used in this thesis is using the type of normative legal research using a case approach and a statutory approach. The legal material collection technique used is using document studies (literature studies), by collecting primary legal materials in the form of laws and regulations, as well as secondary legal materials including books, journals, and scientific papers, related to this thesis.

The results of the study are that Law Number 1 of 1974 concerning Marriage stipulates that every marriage, including those of a mixed nature between Indonesian citizens and foreign nationals, must meet formal and material requirements in order to be legally valid. In the context of marriages with illegal foreign immigrants, these requirements are generally not met, resulting in the relationship not being legally recognized and being outside the protection of national law. Marriages between Indonesian citizens and illegal foreign immigrants, such as Rohingya refugees, raise complex legal issues. Indonesian citizens face administrative obstacles and restrictions on their rights, while foreign partners are threatened with deportation and loss of legal status. Children from these marriages are at risk of being considered illegitimate, facing difficulties in obtaining citizenship and civil registration, and limited legal protection. This condition demands a legal response that guarantees certainty and protection for all parties.

It is recommended that the government develop a comprehensive and adaptive regulatory framework for the phenomenon of mixed marriages, in order to ensure the effectiveness of legal protection without ignoring the principle of state sovereignty and orderly immigration administration.

Keywords: Marriage, Foreign Immigrants, Illegal, Rohingya, Regulations.